

**PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
DALAM PERSPEKTIF *REINVENTING GOVERNMENT*
(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)**

Ismuhadi Heru Wijayanto, Agus Suryono, Sukanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: heru.wijaya91@gmail.com

Abstract. *Tourism Potensial Development in Reinventing Government Perspective.* Lamongan Regency tourism have significant improvement in one last decade especially after built Lamongan Marine Tourism (WBL). This phenomenon interested to examines on reinventing government perspective. This perspective is considered the most synchronous bureaucracy as an instrument to develop the tourism industry. The main idea of this concept is how entrepreneurial public sector bureaucracy in order to run the organization more competitive, effective and efficient through 10 principles of reinventing government. This research used qualitative approach with exploratory method. Data analysis by Miles and Huberman, it is concluded that the correspondence between the implementation of Reinventing Government perspective on the performance of the Department of Culture and Tourism Lamongan is achieving 80% compliance rate. This rate is obtained from the results of the 10 principles contained in the Reinventing Government, Disbudpar Lamongan meet 8 principles, while two other principles less fulfilling.

Keyword: *development, tourism potential, reinventing government*

Abstrak : *Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government.* Pariwisata Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah dibangunnya Wisata Bahari Lamongan pada tahun 2004. Fenomena di sektor pariwisata ini menarik untuk dikaji dalam perspektif reinventing government. Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirauahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien melalui 10 prinsip reinventing government. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratori dengan lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian antara implementasi perspektif Reinventing Government terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam Reinventing Government, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi.

Kata kunci: *pengembangan, potensi pariwisata, reinventing government*

Pendahuluan

Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Timur oleh Pemerintah Jawa Timur. Di samping itu Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang memiliki potensi objek wisata alam dan budaya telah mendapatkan perhatian wisatawan lokal dan nasional yang ditunjang oleh beberapa faktor antara lain: a) keadaan topografis; b) keadaan geografis; c) keadaan sosial budaya; d) iklim, fauna dan kekayaan alam.

Dalam konteks pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Lamongan saat ini, memiliki kecenderungan bahwasannya hanya Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang memiliki daya saing yang cukup signifikan. Meskipun dapat diakui WBL meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan bagi daerah. Namun, jika pemerintah daerah dapat mengaji lebih mendalam, pemerataan pembangunan kawasan sangatlah penting untuk mengurangi disparitas antar wilayah di Kabupaten Lamongan.

Mengingat hal tersebut, maka dalam penelitian ini, coba diajukan sebuah pendekatan mengenai bagaimana strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata daerah dengan menggunakan perspektif *reinventing government*. Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirauusahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien.

Dalam konsep *reinventing government* pemerintah daerah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melakukan inovasi-inovasi yang signifikan dalam pengembangan pariwisatanya. *Reinventing government* adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak birokrasi untuk menstimulasi inovasi sektor publik yang didasarkan pada 10 prinsip.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pengembangan potensi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sesuai dengan prinsip-prinsip *reinventing government*; 2) Bagaimanakah faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan secara baik Nicholas Henry dalam Keban (2004, h.5).

2. Reinventing Government

Gagasan *Reinventing Government* yang dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler adalah gagasan yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik tersebut untuk optimalisasi pelayanan publik. Gagasan *Reinventing Government* dikemukakan oleh David Osborne dan

Ted Gaebler pada tahun 1992. Gagasan ini muncul sebagai respon atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika sehingga timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Gagasan-gagasan Osborne dan Gaebler (1996, h.29-343) tentang *Reinventing Government* mencakup 10 prinsip tersebut adalah: a) Pemerintahan katalis yakni mengarahkan daripada mengayuh; b) Pemerintahan milik rakyat yakni memberi wewenang daripada melayani; c) Pemerintahan yang kompetitif yakni menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan; d) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi yakni mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan; e) Pemerintahan yang berorientasi hasil yakni membiayai hasil, bukan masukan; f) Pemerintahan berorientasi pelanggan yakni memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi; g) Pemerintahan wirausaha yakni menghasilkan daripada membelanjakan; h) Pemerintahan antisipatif yakni mencegah daripada mengobati; i) Pemerintahan desentralisasi yakni dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja; j) Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

3. Kepariwisata

Menurut definisi yang luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu Kodhyat dalam Spillane (1994, h.21).

4. Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan objek wisata menurut Yoeti (1996, h.53) pada dasarnya mencakup tiga hal yang sangat berkaitan, yaitu: a) Pembinaan produk wisata; b) Pembinaan masyarakat wisata; c) Pemasaran terpadu.

5. Konsep Ekowisata

Ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima as-

pek utama untuk berkembangnya ekowisata adalah: a) Adanya keaslian lingkungan alam dan budaya; 2) Keberadaan dan daya dukung masyarakat; 3) Pendidikan dan pengalaman; 4) Berkelanjutan dan; 5) Kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata Choy dalam Kurnianto (2008, h.102).

6. Pariwisata dan PAD

Di Indonesia sektor yang paling dominan dan banyak dikembangkan pada saat ini adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regiona.

Jadi, sasaran yang akan dicapai dalam rangka otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam hal ini potensi-potensi yang ada di daerah berkenaan dengan pariwisata yang bertujuan dapat peningkatan PAD.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini selanjutnya akan menggunakan jenis penelitian kualitatif metode eksploratori. Penelitian eksploratori atau *exploratory research* dalam istilah lama disebut penelitian eksploratif, merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian. Penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis Kotler dalam Amirin (2009, h.1).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Adapun fokus penelitian ini antara lain: a) Implementasi 10 prinsip dalam perspektif *reinventing government* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; b) Faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Pembahasan

1. Implementasi 10 prinsip dalam perspektif *Reinventing Government* di Disbudpar Kabupaten Lamongan

Reinventing Government merupakan prinsip mewirauasakan birokrasi. Dalam prinsip ini tergantung 10 prinsip yang menjadi acuan. Secara umum konsep ini digambarkan sebagai usaha organisasi pemerintahan yang mengadopsi prinsip bisnis dalam mencapai kinerja layanan.

Adapun dari hasil penelitian di lapangan ditemukan data dan fakta terkait implementasi *reinventing government* di Disbudpar Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

a. Pemerintahan Katalis

Dalam prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah memiliki kebijakan strategis maupun rencana kegiatan yang tersusun selama lima tahun yang tertuang dalam renstra. Dalam rencana kegiatan itu, sudah terdapat target selama lima tahun, realisasi program, dan juga rincian dana untuk melakukan suatu pro-program serta kegiatan. Oleh karena itu dalam prinsip pemerintah katalis, Disbudpar sudah menggunakan tugas dan fungsinya untuk membuat kebijakan strategis dengan baik.

b. Pemerintahan Milik Masyarakat

Dalam prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Lamongan mempunyai program yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata (KSW). KSW ini yang diharapkan memiliki kontribusi dan aspirasi untuk Disbudpar Kabupaten Lamongan dalam menyusun program ke depan. Masyarakat berusaha dilibatkan dalam penyusunan langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah mengusahakan keperinatahannya bersama masyarakat dengan cukup baik melalui program yang sudah dicanangkannya.

c. Pemerintahan Kompetitif

Dalam prinsip pemerintahan yang kompetitif, adalah bagaimana Disbudpar Kabupaten Lamongan mampu berdaya saing dengan pemerintah daerah yang lain untuk pengembangan pariwisata. Hal itu terbukti dengan kunjungan pariwisata Kabupaten Lamongan yang secara kuantitas tidak jauh dengan daerah yang lain, bahkan unggul dari beberapa daerah lain di Kawasan A daerah tujuan wisata Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dalam prinsip pemerintahan kompetitif Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

d. Pemerintahan digerakkan Misi

Disbudpar Kabupaten Lamongan memiliki visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Lamongan. Misi tersebut memiliki orientasi jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek yang cukup terarah. Visi misi tersebut tertuang dalam rencana strategis Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Lamongan telah memenuhi prinsip yang dinamakan pemerintahan digerakkan oleh misi.

e. Pemerintahan Berorientasi Hasil

Pada prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Lamongan berusaha menentukan kebijakan strategis dan melakukan program serta kegiatan yang berlandaskan atas apa *outcome* yang akan diterima. Hal itu terbukti dengan Disbudpar Kabupaten Lamongan yang menerima penghargaan atas jasanya mengelola pariwisata dengan baik. Oleh karena itu, pada prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Lamongan telah melakukan proses dan menghasilkan kemanfaatan dengan baik.

f. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan

Prinsip pemerintahan berorientasi pada pelanggan ini fokus utamanya adalah kepuasan pengunjung. Dalam hal kepuasan pada pengunjung, Disbudpar Kabupaten Lamongan berupaya untuk melakukan program dan perbaikan-perbaikan sarana prasarana di beberapa objek wisata. Oleh karena itu dalam prinsip ini Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah berupaya dan dijalankan dengan baik.

g. Pemerintahan Wirausaha

Pada dasarnya, prinsip ini adalah bagaimana Disbudpar Kabupaten Lamongan mendapatkan keuntungan atau profit dari kebijakan dan program yang sudah dijalankan. Disbudpar Kabupaten Lamongan melakukan

sebuah upaya lima tahun terakhir ini melakukan program pengembangan pariwisata yang diharapkan memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, dalam prinsip ini Disbudpar Kabupaten Lamongan telah melakukan kinerja yang cukup baik karena memiliki kontribusi yang signifikan bagi PAD Kabupaten Lamongan.

h. Pemerintahan Antisipatif

Fokus utama dalam prinsip ini adalah bagaimana kebijakan strategis Disbudpar Kabupaten Lamongan untuk mengatasi hambatan yang akan datang di masa depan. Untuk pengelolaan hambatan pengembangan pariwisata ini, Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah memiliki dokumen perencanaan dan penanganan pada hambatan yang sudah dianalisis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Lamongan sudah menjalankan prinsip ini dengan cukup baik.

i. Pemerintahan Desentralisasi

Dalam prinsip ini, yang menjadi fokus perhatian adalah penyerahan atau pendistribusian tugas dan wewenang ke pada level pemerintahan yang lebih rendah. Disbudpar Kabupaten Lamongan tidak sepenuhnya memiliki kewenangan pada seluruh objek wisata di Kabupaten Lamongan untuk dikelola. Karena ada beberapa pariwisata yakni WBL dan Mazoola yang pengelolaannya masih dalam naungan Pemkab dan swasta. Sementara itu, Disbudpar Kabupaten Lamongan hanya menaungi wisata Makam Sunan Drajad dan Waduk Gondang. Oleh karena itu dalam prinsip ini masih belum berjalan dengan baik pada Disbudpar Kabupaten Lamongan.

j. Pemerintahan Berorientasi pada Pasar

Fokus perhatian dalam prinsip ini adalah usaha pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan. Disbudpar Kabupaten Lamongan menaungi dua pariwisata yakni Makam Sunan Drajad dan Waduk Gondang. Namun dalam proses pengembangan itu, Disbudpar Kabupaten Lamongan belum mampu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi di objek pariwisata yang mereka naungi. Oleh karena itu dalam prinsip ini

belum bisa dijalankan dengan baik oleh Disbudpar Kabupaten Lamongan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan Potensi Pariwisata pada Disbudpar Lamongan

Faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan potensi pariwisata dihadapkan pada dua aspek, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara umum, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata adalah:

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didukung dengan sumber daya manusia yang ada di Disbudpar Kabupaten Lamongan.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan respon wisata sehingga aksesibilitas wisata sangat terlambat.
- c. Sarana Prasarana serta wahana sajian pada objek wisata khususnya objek wisata Waduk Gondang maupun Wisata Sunan Drajat masih sangat terbatas (belum memenuhi kebutuhan konsumen wisata).
- d. Keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan inovasi pengembangan pariwisata sehingga intensifikasi wahana sajian di objek-objek wisata tidak dapat dilakukan.
- e. Belum adanya kerjasama Disbudpar Kabupaten Lamongan dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata yang lebih massif.

3. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata pada Disbudpar Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini, konsep *Reinventing Government* menjadi tinjauan utama sejauh mana Disbudpar Kabupaten Lamongan dapat menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan. *Reinventing Government* memiliki 10 prinsip yang berusaha melihat kinerja birokrasi dalam hal ini Disbudpar dalam manajemen pariwisata Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, konsep *Reinventing Government* ini hanya sebatas mengakaji pada dimensi pemerintahan yakni Disbudpar Kabupaten Lamongan.

Sementara ekowisata adalah strategi pengembangan Pariwisata yang bersifat makro. Dimana dalam pendekatan ekowisata salah satunya terdapat pendekatan organisasi sektor publik. Mengacu pada hal tersebut maka organisasi sektor publik, Disbudpar, menjadi salah satu penunjang ekowisata yang sangat sentral. Jika organisasi sektor publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pariwisata, maka pariwisata berbasis ekowisata juga akan tercapai dengan baik.

Dalam analisis peta potensi ekowisata ini, fokus utama pembahasan akan lebih fokus kepada wisata yang dikelola Disbudpar, yakni Waduk Gondang. Karena waduk Gondang di Lamongan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata. Sesuai dengan kondisi di kawasan Waduk Gondang yang merupakan kombinasi daerah darat dan perairan dapat dikembangkan beberapa potensi ekowisata. Potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di Waduk Gondang diantaranya: *agroforest*, perikanan, budaya dan edukasi.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, Potensi Pengembangan Pariwisata dalam Perspektif *Reinventing Government* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, yang menggunakan metode kualitatif eksploratori dengan analisis data menurut Miles dan Huberman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian antara implementasi perspektif *Reinventing Government* terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam *Reinventing Government*, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi. Adapun penjabaran dari hasil kesimpulan tersebut adalah 8 prinsip yang sesuai yakni: a) Pemerintahan Katalis; b) Pemerintahan Milik Masyarakat; c) Pemerintahan Kompetitif; d) Pemerintahan di-gerakkan Misi; e) Pemerintahan Berorientasi Hasil; f) Pemerintahan Berorientasi Pelanggan; g) Pemerintahan Wirausaha; h) Pemerin-

- tahan Antisipatif. Sedangkan terdapat dua implementasi prinsip *Reinventing Government* yang belum terpenuhi yakni: a) Pemerintahan Desentralisasi; b) Pemerintahan Berorientasi pada Pasar.
2. Sementara faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendorong pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan: a) Potensi alam Kabupaten Lamongan yang memiliki daya tarik yakni terdiri dari pantai serta bebatuan sehingga ditetapkan sebagai Kawasan A daerah tujuan wisata Provinsi Jawa Timur; b) Disbudpar memiliki kebijakan strategis yang sangat baik dengan didukung oleh analisis untuk pemecahan masalah yang ada; c) Disbudpar memiliki metode strategi yang sangat komprehensif dalam pengembangan potensi pariwisata, tinggal bagaimana mengelola metode strategi tersebut; d) Program perbaikan sarana prasarana yang diselenggarakan setiap tahun oleh Disbudpar Kabupaten Lamongan; e) Daya tarik wisata Kabupaten Lamongan yang memiliki keanekaragaman dan bisa dikembangkan menjadi kawasan pusat pariwisata sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.
 - b. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan: a) Kemajuan Iptek dan peradaban dunia, maka nilai-nilai luhur seni budaya nasional dan daerah semakin pudar akibat pergeseran pola hidup dan cara berfikir generasi sekarang dan mendatang; b) Belum optimalnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan; c) Belum bisa memaksimalkan peluang untuk menjalin kerjasama dengan kalangan swasta dalam pengembangan semua aspek yang berkaitan dengan budaya dan wisata; d) Keterbatasan dana di daerah guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang objek wisata termasuk aktualisasi seni budaya. e) Minimnya investasi dalam negeri dan asing terhadap pembangunan bidang wisata sehingga pengembangan pariwisata tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang. (2009) **Penelitian Eksploratori (Eksploratif)**. Diakses melalui tatangmangun. <http://wordpress.com/> [diakses pada tanggal 13 Januari 2012]
- Keban, Yeremias T. (2004) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu**. Yogyakarta, Gava Media.
- Kurnianto, Imam Rudy. (2008) **Pengembangan Ekowisata (Ecotourism) Di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal**. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Osborn, David and Gaebler, Ted. (1996) **Mewirauahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirauaha Ke Dalam Sektor Publik**. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Spillane, James J. (1994) **Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya**. Yogyakarta, Kanisius.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yoeti, Oka. (1996) **Pemasaran Pariwisata Terpadu**. Bandung, Angkasa.